

Laporan Pemantauan Penembakan Misterius di Papua Januari - Juni 2012

I. Pendahuluan

Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS terkait aksi penembakan misterius di Papua selama kurun waktu Januari sampai Juni 2012. Data ini diolah dari laporan yang dikirim oleh perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk data hasil pemantauan media massa.

Laporan ini terbagi pada tiga pembahasan, yakni; ringkasan rangkaian peristiwa penembakan misterius (petrus) yang terjadi pada bulan Juni beserta table kasus penembakan selama Januari-Juni, analisa, respon jakarta atas petrus Papua. Di akhir catatan, KontraS memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak terkait, terutama kepada Presiden dan DPRI. Diharapkan kesimpulan dan rekomendasi ini dapat diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemangku kebijakan dalam menyikapi kasus penembakan misterius di Papua demi menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia di Papua.

II. Rangkaian Peristiwa Penembakan Misterius

Insiden Penembakan Misterius (Petrus) tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan KontraS, tahun 2011 terjadi 13 peristiwa, satu peristiwa terjadi tahun 2010 dan 12 peristiwa tahun 2009.

Pada tahun 2012, terhitung dari Januari sampai Juni 2012, telah terjadi 18 peristiwa penembakan yang mengakibatkan setidaknya 7 warga sipil, satu jurnalis meninggal dan 10 orang mengalami luka kritis, termasuk warga negara asing Jerman Dietman Pieper (29/05).

Details on Shooting Incidents for First Semester 2012

Waktu Peristiwa	Jumlah Peristiwa	Pelaku	Korban										
			OTK	TNI		Polisi		Warga		Jurnalis		WNA	
				mati	Luka	mati	Luka	mati	Luka	mati	Luka	mati	Luka
Januari	2	2			1		1						
Febuari	4	4			1		2	6					
Maret	1	1	1										
April	1	1							1				
Mei	3	3					2						1
Juni	7	7		1		2	2	3					
	18	18		1	2	2	7	9	1				1

Dokumentasi KontraS 2012

Peristiwa terbaru terjadi kemarin malam (10/6) sekitar pukul 21.00 WIT. Tri Sasono, warga asal Ngawi, Jawa Timur yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) Supermaket Saga Abe tewas ditembak

saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R nomor polisi DS 3816 AE di halaman gedung FKIP kawasan Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Kota Jayapura.

Sebelumnya, Rabu 6 Juni 2012, sekitar pukul 21.00 WIT, Arwan Kusdini, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Cenderawasih tewas ditembak saat pulang dari Markas Kodam di jalan Walikota, kota Jayapura. Sehari sebelumnya (5/06), sekitar pukul 22.00 WIT, Iqbal Rivai dan Hardi Jayanto yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya ditembak oleh pelaku di daerah Pelabuhan Porasco Jayapura. Kedua korban mengalami luka tembak di pinggang kanan tembus ke perut. Saat ini, kedua korban masih dirawat di RSUD Dok 2 Kota Jayapura.

Kejadian dengan pola serupa juga dialami Golberth Febrian Madika, seorang pelajar SMA Alam Kudus Papua. Awalnya korban yang mengendarai sepeda motor Honda jenis Kharisma bernomor polisi DS 2544AN sedang melintas di turunan Skyline, dekat Kantor Otonom, namun tiba-tiba korban *dipepet* oleh sebuah sepeda motor dan langsung melakukan penembakan. Korban mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan hingga tembus bagian dada depan dan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dok II Jayapura.

Nampaknya aparat kepolisian kesulitan membongkar maupun menangkap para pelaku penembakan misterius. Ini bisa dilihat dari lambannya pengusutan kasus kematian Terjoli Weya, yang ditembak di jalan antara Kantor Koramil 1701 dan Markas TNI AD Perwakilan Jayawijaya (1/05).

III. Analisa Rangkaian Kasus Petrus Papua

Bulan Februari dan Juni 2012 menjadi titik-titik puncak peristiwa penembakan misterius di Papua. Menariknya aksi ini kerap dilakukan antara pagi hingga siang hari (sekitar pukul 06.00 – 11.00 WIT). Artinya, para pelaku memiliki keberanian mengambil risiko untuk melakukan penembakan di jam-jam keramaian. Meskipun kecenderungan waktu penembakan berubah menjelang malam hingga dini hari di bulan Juni 2012.

Kecenderungan lain yang bisa diperhatikan dalam kasus Petrus Papua di semester pertama 2012 lainnya adalah wilayah penembakan. Dari pemantauan KontraS setidaknya lokasi penembakan dikonsentrasikan di 3 wilayah utama Papua: Puncak Jaya, Abepura dan Jayapura. Nampaknya para pelaku ingin tetap “memainkan” sumbu pendek di 3 wilayah tersebut. Puncak Jaya kerap diidentifikasi sebagai basis wilayah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi keamanan kerap digelar di sana untuk mencari aktor-aktor OPM. Kasus video penyiksaan You Tube (2010) dan kasus-kasus penyiksaan lainnya yang mendapat perhatian publik luas kerap terjadi di wilayah Puncak Jaya.

Sedangkan Abepura dan Jayapura merupakan lokasi-lokasi strategis, titik kumpul elemen masyarakat sipil yang kerap menyuarakan aksi-aksi protes sosial politik secara damai. Namun, bentrokan antar pihak keamanan dengan massa aksi juga sering terjadi. Kita bisa ambil contoh kasus pelanggaran HAM serius yang terjadi di Abepura (2000) dan pembubaran Kongres Rakyat Papua III (2011) yang juga terjadi di Kota Abepura.

Pelaku juga secara acak memilih target korban. Dari 3 wilayah di atas para korban memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari warga sipil-beberapa di antara mereka berprofesi sebagai tukang ojek, jurnalis, guru sekolah; aparat keamanan (TNI dan Polri); hingga warga negara asing; Jerman. Namun hampir semua korban ditembak di tempat yang mematikan, seperti di bagian kepala, dada, leher, wajah dan punggung tembus ke dada.

Khusus untuk kasus penembakan aparat keamanan, aksi tersebut dilakukan ketika para aparat keamanan tengah menggelar patroli rutin. Motif ekonomi tetap tidak bisa diarahkan dalam pola kekerasan ini, mengingat para pelaku Petrus Papua tidak pernah mengambil barang-barang milik korban.

IV. Respons Jakarta atas Petrus Papua

Hadir respons yang beragam dari analis politik dan para pengampu kebijakan keamanan di Jakarta menyoroti signifikansi meningkatnya penembakan misterius di Papua. Peneliti LIPI Muridan Widjojo menyampaikan bahwa serangkaian peristiwa penembakan misterius di Papua dilakukan oleh orang-orang terlatih dan terorganisir secara sistematis. Menurutnya hal ini terkait erat dengan akibat persaingan satuan-satuan militer di Papua. Satuan-satuan itu berasal dari TNI, Polisi, Intelijen. Akar masalahnya berawal ketika satu per satu operasi militer diturunkan ke Papua dengan alasan munculnya kelompok separatis. Bukan hanya persaingan militer diantara satuan-satuan itu. Mereka juga berlomba-lomba membuat organisasi warga Papua dan mengklaim sebagai warga binaan mereka. Persaingan-persaingan ini yang membuat aparat tidak fokus menjaga keamanan di Papua. Tak semua kelompok bentukan militer itu dapat berjalan dengan baik. Mereka justru diadu domba dengan kelompok anti militer di Papua.¹

Namun analisa tersebut dibantah keras oleh para pejabat militer, polisi dan intelejen. Mereka tetap meyakini bahwa pelaku penembakan adalah kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan Papua. Sebagaimana yang disampaikan Kapolda Papua, Irjen B.L Tobing bahwa Briptu Ronald ditembak oleh kelompok bersenjata yang selama ini dicari polisi yakni kelompok separatis yang dulu dipimpin oleh Kelly Kwalik.² Pernyataan-pernyataan senada juga disampaikan oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw yang mengatakan pelaku penembakan tukang ojek di Kampung Kulirik diduga adalah kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan Papua;³ Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono, pelaku penembakan diduga dari kelompok Yambi yang masih ingin menunjukkan eksistensi mereka.⁴

Pernyataan tersebut diperkuat dengan tudingan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI M. Erwin Safitri yang menyatakan bahwa hal ini adalah ulah Organisasi Papua Merdeka yang telah dilakukan berulang kali.⁵ Senada juga dengan pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara kepada publik yang menyatakan bahwa kekerasan ini adalah ulah Operasi Papua Merdeka.⁶

Ramainya tudingan yang mengarah kepada OPM tidak diikuti dengan pembuktian maupun upaya investigasi independen yang maksimal oleh Polri. Hal ini bahkan diakui Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan ada yang melihat peristiwa namun tidak mau memberikan

¹ http://m.kompas.com/news/read/papua_ku_saying_papua_ku_malang, diakses 11 pada tanggal 11 Juni 2012

² <http://regional.kompas.com/read/2012/02/07/09484565/Anggota.Brimob.Tewas.Ditembak.Saat.Patroi> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

³ <http://www.tribunnews.com/2012/02/03/kelompok-bersenjata-tembak-lalu-bacok-daeng-yonri> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

⁴ <http://www.detiknews.com/read/2012/02/02/180720/1832880/10/penembak-2-tukang-ojek-di-puncak-jaya-diduga> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

⁵ <http://nasional.vivanews.com/news/read/303279-pangdam--pelaku-penembakan-trigana-air-opm> diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

⁶ <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/06/11/94398/Kepala-BIN-Kekerasan-di-Papua-Ulah-OPM>, diakses pada 12 Juni 2012.

keterangan, sehingga inilah kesulitan kami.⁷ Tidak adanya saksi mata peristiwa, para pelaku yang cepat melarikan diri dari tempat kejadian perkara dan acaknya peristiwa diklaim sebagai kesulitan yang dihadapi Polda Papua dan Polri.⁸

DPR RI, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan, sebagaimana yang disampaikan oleh TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I) menerangkan adanya kehadiran “tangan-tangan pihak asing” yang bermain di belakang maraknya kekerasan dan penembakan di Papua.

Di lihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya, terlihat jelas kasus ini sepertinya terorganisir dengan rapi, sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar melalui ‘operator lokal’ di lapangan, dan pelaku memiliki kemampuan bergerak/eksekusi secara cepat dari satu tindakan ke tindakan lainnya. Kekerasan itu ditujukan menciptakan instabilitas di Papua.

V. Respons KontraS atas Petrus Papua

Pernyataan yang dikeluarkan institusi keamanan, aparat pemerintah dan DPR sesungguhnya menyebar keresahan publik, sepanjang pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung langkah konkret penegakan hukum dan keamanan di Papua. Pernyataan-pernyataan tersebut harus diuji dalam ruang penyelidikan independen, di mana Polri memiliki otoritas tertinggi untuk menggelar dan menyampaikan hasil temuannya kepada khalayak luas. Secara khusus, Badan Intelijen Negara mestinya dapat bekerja secara profesional untuk mengidentifikasi peristiwa dan melaporkan hal ini langsung kepada Presiden sehingga tidak membuka polemik yang meresahkan di masyarakat.

KontraS tetap mendukung digelarnya sebuah penyelidikan independen yang komprehensif terkait penembakan misterius di Papua. Penyelidikan independen komprehensif ini juga tidak boleh melupakan beberapa kasus penembakan misterius yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya (khususnya rentang antara waktu 2009-2011). Motifnya serupa: mereka yang mengorganisir diri secara sistematis dan meluas, melakukan aksi secara cepat dan rapi, target-target aksi diarahkan kepada warga sipil –bahkan beberapa target juga diarahkan kepada aparat keamanan (TNI dan Polri).

Pembiaran dan pengabaian atas pola kekerasan ini, tidak hanya mengekalkan keresahan dan ketidakamanan publik di Papua. Namun juga menunjukkan ketidakmampuan otoritas sipil dan pelaksana otoritas keamanan dalam menjamin perlindungan rasa aman, menegakkan hukum dengan membawa para pelaku ke ruang meja pengadilan, termasuk menghadirkan rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban yang nyawanya telah dihilangkan dengan metode-metode yang tidak beradab.

VI. Rekomendasi

KontraS merekomendasikan sejumlah, atas catatan diatas;

⁷ <http://nasional.vivanews.com/news/read/281950-1-tewas-di-papua--saksi-ketakutan> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

⁸ http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6757:lagi-tukang-ojek-sasaran- dan <http://news.okezone.com/read/2012/02/06/337/570480/saksi-nihil-polri-sulit-ungkap-penembakan-warga-di-papua> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

1. Presiden harus tidak menganggap remeh situasi di Papua dengan segera melakukan evaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua. Hal ini mengingat peran dan eksistensi mereka belum menjamin rasa aman (perlindungan) warga sipil di Papua.
2. Presiden harus memastikan agar Polri menggelar penyelidikan secara cepat, efektif dan independen dengan membuka ruang pengawasan eksternal yang transparan untuk memastikan pelaku penembakan misterius dibawa ke dalam proses hukum.
3. Presiden dan DPR RI untuk segera membentuk tim untuk audit penggunaan senjata dan peluru yang ada, terutama peluru-peluru yang digunakan dalam penembakan/pembunuhan misterius. Audit ini juga perlu dilakukan untuk mendeteksi sejauhmana penyelundupan senjata terjadi (masuk ke Papua) jika polisi dan berbagai pejabat negara kerap menuduh bahwa pelakunya dari OPM. Singkat kata, muncul pertanyaan, “lalu, darimana OPM bisa mendapatkan senjata?” jawabannya harus dibuktikan dengan tindakan yang otentik bukan sekedar menuduh (lagi).